

Dinamika Islam dan Politik di Indonesia: Analisis Historis dari Masa Kolonial hingga Reformasi

Muh. Samsul Anwar
IAI Hamzanwadi Pancor
muhsamsulanwar@iainwpancor.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji hubungan antara agama Islam dan politik di Indonesia, mulai dari masa awal kedatangan Islam hingga era reformasi. Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem kepercayaan individu, tetapi juga sebagai kekuatan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Terdapat tiga aliran pemikiran mengenai hubungan Islam dan negara: yang menganggap Islam sebagai sistem lengkap termasuk pemerintahan, yang memisahkan agama dari negara, dan yang melihat Islam sebagai sumber nilai etika bernegara.

Sejarah menunjukkan bahwa Islam memiliki peran signifikan dalam pembentukan kebijakan dan sistem politik Indonesia, mulai dari kerajaan-kerajaan Islam, masa kolonial, hingga kemerdekaan. Organisasi seperti Sarekat Islam (SI) dan partai politik seperti Masyumi menjadi wadah perjuangan umat Islam. Pada masa Orde Baru, Islam politik dikebiri, tetapi muncul gerakan kultural seperti DDII yang memengaruhi masyarakat. Era reformasi membuka ruang bagi partai-partai Islam untuk kembali berperan dalam demokrasi.

Selain itu, tulisan ini juga membahas peran kelompok tarekat dan guru sufi dalam politik, terutama dalam mobilisasi massa dan legitimasi kekuasaan. Teori Weber tentang otoritas karismatik digunakan untuk menganalisis pengaruh guru tarekat dalam politik. Kesimpulannya, Islam dan politik di Indonesia memiliki hubungan simbiosis yang kompleks, di mana agama tidak hanya menjadi panduan spiritual tetapi juga kekuatan sosial-politik yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Kata kunci: Islam, politik Indonesia, tarekat, Masyumi, Orde Baru, reformasi.

PENDAHULUAN

Islam bukan hanya suatu afinitas. Ia adalah sesuatu yang dijalankan orang-orang secara publik maupun privat. Islam menanamkan keyakinan dan membentuk pandangan dunia. Islam juga memberikan struktur-struktur pemahaman yakni berbagai cara menghadapi teka-teki kehidupan, serta menawarkan norma-norma sosial. Islam juga membuat asumsi-asumsi yang berbeda menyangkut kebaikan

maupun kebejatan yang melekat pada diri manusia, merumuskan pemikiran-pemikiran bagi desain dan tujuan sistem-sistem politik, serta membangkitkan berbagai harapan menyangkut akhir zaman dan akibat penyelamatan. Pada dasarnya, dalam Islam terdapat ajaran untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Seorang umat dalam menjalankan kehidupannya harus berada di dalam sistem kehidupan. Di dalam sistem kehidupan itu terdapat urusan agama (hubungan langsung dengan Tuhannya), urusan sosial kemasyarakatan yaitu segala macam aktivitas yang berhubungan dengan manusia lain seperti perkawinan, budaya ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi dan urusan politik yaitu urusan pemerintahan. Dalam Islam semuanya itu diatur dalam Al-Quran.

Di kalangan umat Islam sampai sekarang ini terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dengan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Islam berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup

bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.

Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar dan cukup mempunyai andil dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Daya tawar Islam sangat besar bagi negeri ini, baik dalam pengambilan kebijakan atau penetapan hukum peraturan perundang-undangan. Penelusuran terhadap sejarah perpolitikan di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga dapat digunakan untuk mengungkap perjalanan perubahan sistem politik umat Islam di Indonesia. Berpikir secara dialektis akan terlihat perjalanan sejarah sebagai sesuatu yang mapan dan mendapat reaksi hingga pada akhirnya tumbuhnya sintesa baru. Pendekatan ini tentu dapat digunakan untuk mengamati perjalanan sejarah Islam dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Keberadaan umat Islam di negeri ini sering menjadi bahan perbincangan dan peranannya pun mengalami pasang surut. Berbagai perbincangannya tentang Islam dalam konteks politik di Indonesia juga mengindikasikan bahwa ia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai ikut campurnya Islam dalam perpolitikan di Indonesia, lebih dulu kita tahu bagaimana dan kapan Islam datang ke Indonesia. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam.

Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Sampai dengan abad ke-8 H/14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 H/14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan-pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Dengan mayoritas berpenduduk Muslim, politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan peranan ummat Islam. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate.

Saat memasuki kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok yang mempunyai strategi yang berbeda dalam mencapai kemerdekaan.¹ Pertama, kelompok nasionalis oportunis yang menghendaki kemerdekaan melalui Tokyo. Kedua, kelompok pemuda Indonesia yang memilih cara berdiri untuk mencapai kemerdekaan dan bila perlu merebutnya dengan kekerasan dari pihak Jepang. Ketiga, kelompok nasionalis muslim dalam Masyumi yang terbagi dua sub kelompok yaitu golongan Islam yang mempunyai sikap moderat terhadap Jepang dan menganggap Tokyo sebagai tuan yang memberikan kemerdekaan golongan yang berpendidikan Barat. Sedangkan yang satunya yaitu golongan pemuda Islam non akademis yang menginginkan kemerdekaan atas usaha sendiri.² Dari berbagai kelompok tersebut dapat

¹A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Yogyakarta: IAIN Kalijaga, 1988), h. 24

²Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 7-8

disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok dalam masyarakat Indonesia yaitu, kelompok nasionalis dan kelompok Islam nasionalis³.

Dalam rangka persiapan kemerdekaan, Jepang membentuk suatu badan persiapan kemerdekaan dengan nama BPUUPK yang beranggotakan 60 orang. Dalam sidang pertamanya, badan ini bertugas untuk merumuskan Dasar Negara dan Bentuk Pemerintahan. Setelah sidang pertama sebagian anggota melanjutkan pertemuan dan membentuk panitia kecil yang terdiri dari 4 orang Islam nasionalis, 4 orang Islam sekuler dan 1 orang Kristen. Akhirnya dari panitia kecil inilah diperoleh kesepakatan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta⁴.

Pada masa awal-awal kemerdekaan dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, Islam berperan aktif dalam seluruh proses dan perjalanan negara ini. Pada masa pembentukan UUD, terdapat tokoh-tokoh Islam yang ikut dan menjadi penyusun teks undang-undang. Pengaruh tokoh-tokoh yang mewakili Islam ini menghasilkan UUD yang toleran. Pada masa Soekarno ada tiga aliran politik yang mempunyai pengaruh besar, yaitu Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme. Soekarno ingin menyatukan tiga aliran tersebut dibawah kekuasaannya. Namun Soekarno menemui batu sandungan dari Masyumi yang merupakan partai Islam yang tak pernah sepakat dengan Marxisme. Karena usahanya gagal Soekarno ingin kembali pada cita-cita awalnya yaitu mendirikan negara sekuler. Keinginan Soekarno tersebut lagi-lagi terhalang oleh Masyumi yang tetap menjadi oposisi dan berlawanan dengan kebijakan Soekarno yang merapat ke PKI. Akhirnya Soekarno menyerah dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya bahwa dasar negara kembali kepada UUD 45. Dikeluarkannya dekrit ini menunjukkan betapa pengaruh Islam menjadi kekuatan penting dalam pengambilan kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno. Karena pengaruh Islam pada masa Soekarno, sistem politik

³Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, h. 8

⁴Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, h. 9

di Indonesia kembali pada UUD 45 yang merupakan sistem paling toleran yang bisa diterima oleh semua kalangan⁵.

Sejak awal perjuangan bangsa Indonesia umat Islam telah ikut berjuang bersama-sama dan partai pertama yang terbentuk adalah partai Islam, yaitu Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam (SI) adalah organisasi pertama yang menjadikan Islam sebagai penanda identitas kolektifnya dan yang menghubungkan identitas tersebut dengan aksi-aksi radikal. SI mendapatkan dukungan dari kalangan saudagar Muslim, yang sedang resah menghadapi ekspansi modalorng Cina yang bergandeng tangan dengan pemerintah kolonial. Di sini terlihat kepentingan kelas menengah 'pribumi' yang sedang tumbuh. Akan tetapi yang menggerakkan SI tidak hanya Islam, tetapi juga sosialisme. Di beberapa tempat SI lokal bahkan bekerjasama dengan kalangan komunis.

Islam di Indonesia

Memasuki periode kemerdekaan, Islamisme di Indonesia dialamatkan kepada Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Dua gerakan ini secara eksplisit menyebut pendirian negara Islam sebagai salah satu agendanya, meskipun dalam cara bagaimana agenda itu diwujudkan, keduanya mempunyai metode yang berbeda. Dalam arus utama historiografi Indonesia, DI disebut sebagai 'pemberontak', sementara Masyumi – yang sebagian tokohnya tetap dihubung-hubungkan dengan 'pemberontakan' PRRI/Permesta – ikut serta dalam Pemilihan Umum 1955 namun akhirnya dibubarkan oleh Sukarno pada tahun 1960. Baik DI maupun Masyumi pada dasarnya dipimpin oleh kalangan 'lumpen-intelligentsia', baik dari kalangan sipil dan militer, yang akhirnya tersingkir dari proses politik.

⁵Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, h. 9

Masa Demokrasi Parlementer, Islam masih berperan aktif dalam perpolitikan di Indonesia. Sejak dikeluarkannya Maklumat no. X tanggal 16 Oktober 1945⁶ tentang pendirian partai-partai politik, maka demokrasi Indonesia diramaikan dengan munculnya partai-partai politik seperti PNI, PSI, Masyumi, Perindo, PBI dan lain-lain. Terbuktinya Islam berperan aktif dalam demokrasi ini adalah ketika partai umat Islam yaitu partai Masyumi dapat memimpin beberapa kabinet, antara lain Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman dan Kabinet Burhanudin Harahap dan yang terakhir menjadi pendukung utama pada Kabinet Ali Sastroamodjojo II sebagai hasil dari Pemilihan Umum pada 1955.

Setelah Demokrasi Parlementer Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin. Tampaknya pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno benar-benar menerapkan gagasannya tentang demokrasi dan menggandeng PKI dan Militer sebagai partnernya. Meskipun gagasan Soekarno mendapat tantangan dari umat Islam, khususnya Masyumi tetapi Soekarno tetap pada pendiriannya. Pada masa ini, kekuatan Islam mulai redup, meskipun telah diwakili oleh NU, PSII, dan Perti.⁷

Di era Orde Baru, semula memang ada kecenderungan untuk merumuskan relasi antara agama dan politik tersebut di dalam coraknya yang separated atau terpisah. Namun upaya-upaya ini selalu mengalami kegagalan. Meskipun secara formal bahwa agama tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar bagi organisasi, sebab semua harus menjadikan Pancasila sebagai asas dan dasar organisasi, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Bahkan semua organisasi tetap saja berhaluan sebagaimana visi para pendahulunya mengenai apa yang harus dilakukannya. Maka agar dapat menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi keagamaan (Islam), maka ditafsirkanlah Pancasila tersebut dalam perspektif keislaman. Maka muncullah relasi Pancasila dan Islam atau pandangan Islam tentang Pancasila. Usaha untuk menjadikan relasi antara agama dan negara yang sekularistik kemudian mengalami kebuntuan, ketika kemudian Pancasila ternyata justru memiliki relevansi yang sangat

⁶Bibit Surapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.25

⁷Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafiti Press, 1987), h.333

kuat dengan agama. Di dalam hal ini maka relasi antara Islam dan Negara tetap berada di dalam coraknya yang simbiosis mutualisme⁸.

Di bawah rezim Orde Baru yang tegak di atas suasana Perang Dingin, Islamisme yang berasosiasi dengan Islam politik dikebiri, seperti juga kekuatan kiri yang sebelumnya telah dihabisi pasca peristiwa 1965. Pada 1973, partai-partai Islam yang masih bertahan difusikan ke dalam satu wadah baru bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berideologi Pancasila. Sejak itu praktis perjuangan kelompok Islamis dalam politik elektoral untuk sementara terhenti. Akan tetapi beberapa eksponen Masyumi yang masih menyimpan utopia tegaknya negara Islam berhasil mendirikan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang berorientasi kultural. Organisasi ini mempunyai kontak yang kuat dengan Timur Tengah. Melalui DDII, pengaruh Islamisme dari Timur Tengah menyebar di Indonesia⁹.

Pada saat yang sama, Orde Baru telah menjadi tempat tumbuhnya satu generasi Muslim yang pada satu sisi menjadi bagian dari kelas yang diuntungkan oleh proses pembangunan, dengan kata lain ekspansi pasar, tetapi pada satu sisi mereka adalah individu-individu yang tetap mengidealkan Islam sebagai sistem yang mencakup agama dan politik sekaligus.¹⁰ Banyak anggota gerakan Islamis yang kelak tumbuh pada periode pasca-Orde Baru berasal dari kelas ini. Akan tetapi, di sisi lain, proses pembangunan juga menghasilkan kelas marginal. Sebagian dari mereka menjadikan Islam sebagai simbol populisme melawan apa yang mereka tuduh sebagai situasi ketidakadilan – korupsi, kolusi, nepotisme.

Pada masa reformasi yang dimulai dengan mengundurkan dirinya Soeharto dari kursi kepresidenan memberikan angin segar bagi harapan terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik di Indonesia. Perubahan peta politik secara teratur terjadi, dimulai dengan runtuhnya cengkaman Orde Baru yang dimotori oleh Golkar,

⁸Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, h.334 lihat juga dalam Muh Zakaria, “17-27 Perkembangan Pemikiran Studi Keislaman Di Indonesia: Paradigma Interpretasi,” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 18, no. 2 (December 10, 2020): 17–27, <https://doi.org/10.37216/tadib.v18i2.373>.

⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, h.334

¹⁰Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, h. 335

pergantian iklim politik dan kepartaian dengan dibukanya keran demokrasi dengan diawali diberikannya keleluasaan untuk mendirikan partai politik.

Semenjak awal, Indonesia memang memilih relasi antara Islam dan politik dalam coraknya yang simbiosis mutualisme. Hal ini tentu saja didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Islam. Ulama-ulama Islam Indonesia, sebagaimana di dalam penetapan UUD 1945 dalam banyak hal mengikuti pandangan moderatisme Islam dengan tidak mengharuskan formalisme agama. Memang terjadi berbagai macam perubahan di seputar keinginan untuk merumuskan relasi Islam dan politik ini. Jika di masa awal, memang terdapat kecenderungan untuk merumuskan relasi Islam dan negara (politik) dalam coraknya yang simbiosis, maka pada dekade sesudahnya, kemudian terjadi tarik menarik yang kuat, apakah akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan Islam dan politik yang integrated atau bahkan sekular.

Islam Indonesia mendapat apresiasi luas dari para pengamat karena dianggap mempunyai karakter yang berbeda dengan Islam Arab. Islam Indonesia digambarkan cukup toleran terhadap kelompok agama lain, sementara Islam Arab sebaliknya. Di atas semuanya, Islam Indonesia dinilai mampu beradaptasi dengan kemoderenan, termasuk demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketika gerakan-gerakan Islam radikal muncul segera setelah Orde Baru jatuh pada 1998, apresiasi terhadap Islam Indonesia tersebut pelan-pelan sirna. Para pengamat yang bertolak dari perspektif studi keamanan melihat Indonesia sebagai arena baru terorisme baik yang berskala regional maupun internasional, seperti jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai hubungan dengan al-Qaida. Sejak itu kajian terhadap Islam Indonesia tidak lengkap rasanya kalau tidak dikaitkan dengan isu radikalisme agama.

Oleh sebab itu, memotong pemahaman tentang Islam Indonesia hanya pada periode pasca-1998 sama dengan mengaburkan pemahaman tentang kompleksitas Islam Indonesia itu sendiri. Sejak awal Islam adalah sebuah teks yang ditafsirkan secara berbeda-beda mengikuti latar belakang penganutnya yang juga beragam. Meskipun dikatakan masuk dengan jalan damai, Islamisasi di Indonesia dalam

beberapa kasus menimbulkan konflik. Ini penting dikemukakan agar pemahaman kita tentang Islam, Islamisme, dan kaum muslim ditempatkan dalam lanskap sosial yang sudah pasti di dalamnya terdapat persaingan dan kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, relasi Islam dan politik, atau Islam dan negara, tidak semata-mata merupakan pengejawantahan dari pandangan normatif keagamaan, atau sekadar tanggapan reaksioner terhadap kekuatan-kekuatan diluar Islam, tetapi juga bagian dari transformasi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Agama merupakan suatu sistem yang terpadu terdiri atau keyakinan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam satu komunitas moral yang dinamakan umat, demikianah agama menurut Durkheim. Agama memang memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran, agama pun semakin menempatkan diri pada posisi-posisi yang strategis yang dapat dilihat dan dilegitimasi oleh masyarakat sipil bahkan elit-elit birokrasi. Dengan kata lain, agama sudah bisa dikatakan ikut serta memainkan peranan politik di sebuah negara, misalnya di Indonesia.

Penyatuan umat melalui doktrin agama memang sangat efektif untuk mengumpulkan massa. Dengan merasa satu keyakinan dan satu rumpun orang-orangpun tidak akan berpikir panjang untuk melegitimasi orang yang seideologi dengannya. Pada masa Orde Baru misalnya, bagaimana kaum-kaum agamais yang memiliki pengikut yang banyak ikut berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia. Pemerintahpun mengamini akan hal itu, melihat pengaruh agama yang begitu kuat baik itu dari golongan sufi ataupun golongan tarikat.

Golongan-golongan ini yang awalnya berorientasi pada nilai-nilai spiritual, namun pada masa Orde Baru sudah mulai masuk kepada ranah-ranah politik bahkan masuk menjadi anggota-anggota partai politik tertentu. Demikian juga para guru-guru sufi dan tarikat dijadikan sebagai alternative bagi penguasa sebagai pembimbing spiritualnya, tapi jika kita lihat dari segi politik maka pemerintahpun menggunakan

massa dari guru-guru sufi dan tarekat ini untuk melancarkan perjalanan birokrasi di Indonesia.

Perkembangan Islam pada masa Modern

Penelitian sosioogis pada 1950-an menunjukkan adanya dua pola kepercayaan dan ritual yang berbeda dikalangan masyarakat jawa, secara nominal beragama Islam. Dua pola ini kemudian dikenal dengan istilah *santri* dan *abangan*.¹¹ *Santri* adalah muslim yang relatif lebih tegas menaati syariah, melaksanakan shalat secara teratur, puasa selama ramadhan dan menunaikan ibadah haji jika memiliki ekonomi yang cukup untuk menunaikan ibadah ini. Sedangkan *Abangan* memeluk kepercayaan sinkretis dan menjalankan berbagai ritual lainnya. Atau bisa dikatakan *Abangan-Sinkreti* sistem budaya yang menggambarkan percampuran antara budaya Islam dan budaya lokal.¹²

Clifford Geertz mengatakan dalam karyanya *The Religion of Java* masyarakat Jawa memiliki struktur sosial yang berlainan yaitu *Abangan* (yang intinya berpusat di pedesaan) *Santri* (yang intinya berpusat di perdagangan atau pasar) dan *Priyayi* (yang intinya berpusat di pemerintahan, di kota). Namun setelah masuknya peradaban Hindu dan Islam di Jawa telah mewujudkan adanya: *Abangan* (yang mementingkan aspek animistik) *Santri* (yang menekankan aspek-aspek Islam) dan *Priyayi* (yang menekankan aspek Hindu).¹³

Terlepas dari pengelompokan stuktur sosial yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, bahwa kondisi keagamaan masyarakat mengalami perubahan. Terlihat pada Pemilu pertama pada 1955, kurang dari separuh jumlah kaum muslim Indonesia adalah *santri*. Akan tetapi jika kita lihat kaum muslim di perkotaan cenderung

¹¹ Martin Van Bruinessen, *Urban Sufisme*, Rajawali Press: Jakarta, 2008, hal. 156.

¹² Sutiono, *Benturan Budaya isam, Puritan dan sinkretis*, PT. Komasa Media nusantara: Jakarta, 2010, hal. 5.

¹³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, PT. Dunia Pustaka Jaya: Jakarta, 1983, hal. VII. Lihat juga dalam Muh. Sya'rani and Muh. Zakaria, "Dinamika Dan Problematika Pendidikan Agama Masyarakat Minoritas Islam Wetu Telu Di Lombok Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Penelitian Tarbawi* 4, no. 2 (September 19, 2019): 24–43, <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v4i2.234>.

dipengaruhi pemikiran modernis dan menolak praktik tradisional kaum santri dan abangan. Muhammadiyah (1912) misalnya, yang berkarakter perkotaan yang aktivitasnya terfokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial. Disisi lain untuk menentang hal ini muncullah NU (1926) sebagai sebuah perkumpulan untuk mempertahankan praktik santri tradisional dan ulama tradisional terhadap serangan pembaharu.

Selama beberapa dekade pertama Orde Baru, muslim santri nyata-nyata takterwakili dalam golongan elit militer, administrasi, politik, bisnis dan budaya, namun gerakan Islamisasi muncul dari bawah sampai akhirnya banyak mahasiswa yang berlatar belakang santri naik ke jabatan-jabatan yang sebelumnya dipegang golongan elit "sekuler" generasi tua. Kebijakan pun berbelok ke Islam, dalam kebijakan Soeharto ketika bersekutu dengan kelas menengah muslim baru dalam melaksanakan sejumlah langkah simbolik penting yang pro-Islam. Gambaran ini sudah mengatakan perpindahan orientasi keagamaan *abangan* menuju *santri*. Tarekat pun memainkan peranan penting dalam peralihan ini.

Dari Tarikat Ke Politik

Tarekat sebagai perkumpulan rill para ahli ibadah merupakan fenomena yang relative baru di Indonesia. Sebuah tarekat dalam pengertian tertentu adalah perkumpulan sukarela yang para anggotanya bergabung demi tujuan yang terkait dengan konsepsi tentang kemaslahatan umat. Diantara mereka yang secara rutin mengikuti ritual berjamaah, afiliasi dengan tarekat melahirkan kepercayaan sosial dan bahkan sering pula setingkat solidaritas atau bantuan sesama yang saling menguntungkan. Guru tarekat atau sufi dalam hal ini menjadi panutan setiap pengikutnya, mereka para guru tarekat mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat, hal ini mungkin karena ajaran tarekatnya atau bisa jadi karena karismatik yang dimilikinya. Jadi dengan kekarismatikan yang dimiliki akan sangat mudah mengorganisir para pengikut-pengikut tarekatnya.

Mungkin ini ada kaitannya dengan teori Weber tentang tiga hal mendasar yang yang digunakan para pengikut untuk melegitimasi sebuah otoritas, yaitu *rasional*, *tradisional* dan *karismatik*.¹⁴Otoritas yang mendapatkan legitimasi *rasional* bersandar pada “kepercayaan akan legitimasi aturan tertulis dan hak mereka yang diberi otoritas berdasarkan aturan untuk mengeluarkan perintah.” Otoritas yang mendapatkan legitimasi *tradisional* didasarkan pada “kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tradisi kuno dan legitimasi mereka yang menjalankan otoritas berdasarkan tradisi tersebut.” Dan yang terakhir otoritas yang mendapat legitimasi dari *karisma* didasarkan pada kesetiaan para pengikutnya terhadap kesucian yang tidak lazim, sosok teladan, heroism, atau kekuatan khusus (misalnya, kemampuan yang mampu menciptakan hal-hal diluar kebiasaan masyarakat) yang dimiliki pemimpin, maupun pada tataran normative yang diberlakukannya.

Jika kita melihat teori Weber diatas, maka kita akan menemukan legitimasi yang diberikan masyarakat kepada guru-guru tarekat adalah dari karismatiknya. Dengan demikian guru tarekat akan mudah memerintah para anggotanya melakukan suatu hal yang diperintahkan guru tarekat.

Para guru sufi kemudian terlibat aktif dalam dua perkumpulan penting Muslim tradisional yang muncul pada kuartal kedua abad ke-20. ¹⁵ Nahdlatul Ulama di Jawa Timur (1926) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Sumatera Barat (1930). (Keduanya menjadi partai politik setelah kemerdekaan Indonesia dan menyebar secara bertahap ke seluruh Indonesia). Tarekat menjadi semakin menonjol di NU setelah kemerdekaan Indonesia, ketika politik pemilihan memperkuat posisi ulama yang bisa memobilisasi banyak suara. Dalam kasus Perti, para Syaikh Naqsyabandiyah sangat menonjol sejak awal, karena tarekat ini banyak diterima di Sumatera Barat.

Konflik antara guru-guru senior Naqsyabandiyah di Sumatera Barat dengan seorang kolega yang ambisius, Haji Jalaluddin, melahirkan partai tandingan bagi

¹⁴ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2009, hal. 140.

¹⁵Martin Van Bruinessen, *Urban Sufisme*, Rajawali Press: Jakarta, 2008, hal. 166.

Perti. Partai tandingan itu adalah Partai Politik Tarekat Islam (PPTI). Haji Jalaluddin sebagai politisi yang cerdas berhasil menarik Syaikh Naqsyabandiyah Minangkabau kedalam organisasinya. Ketika PPTI berjalan baik dalam pemilu 1955, bahkan di beberapa wilayah di Sumatera mendapat 10 persen suara, Haji Jalaluddin kemudian menjadi orang yang berpengaruh di Jakarta. Ia diduga dekat dengan presiden Soekarno, ia mampu merayu Syaikh tarekat berpengaruh untuk dicantumkan namanya di PPTI dan bergabung secara formal dalam Dewan Mursyidin. Kemudian Jalaluddin berhasil memasukkan PPTI ke dalam struktur Golongan Karya (Golkar) sebagai satu-satunya lembaga yang mewakili kelompok fungsional dari para pengikut tarekat. Selama masa Orde Baru, ketika Golkar berperan sebagai partai pemerintah, PPTI tetap menjadi satu-satunya perkumpulan tarekat yang memperoleh legitimasi pemerintah dan beragam fasilitas yang menyertainya.

Tarekat, Partai Politik dan Legitimasi Pemerintah

Sejak 1970-an, atau mungkin sedikit lebih awal, tarekat memperoleh penerimaan yang lebih menonjol di NU. Sejumlah guru sufi, yang telah bertemu sejak akhir 1950-an untuk membicarakan kemaslahatan bersama, mendirikan sebuah perkumpulan tarekat "ortodoks" yang dinamakan *Jam'iyah Ahlit Thariqah Mu'tabarah*. Penggunaan istilah *mu'tabarah* atau diakui menunjukkan keinginan mereka untuk membedakan sufisme "ortodoks" dengan mistisme gerakan kebatinan dan tarekat lokal, yang semakin gencar dikritik oleh kalangan muslim pembaharu dan tradisionalis konservatif. Gerakan kebatinan terus berupaya mencari pengakuan yang sejajar dengan agama dan diduga memiliki dukungan politis kuat pada masa Soekarno dan tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto, dan beberapa gerakan kebatinan dan tarekat lokal memperoleh stigma buruk karena dugaan ikatannya dengan komunisme. Para pendiri *Jam'iyah* tampaknya ingin dianggap sebagai *mu'tabar* di mata Muslim yang berorientasi pada syariah dan sekaligus dimata pejabat berwenang pemerintah.¹⁶

¹⁶Martin Van Bruinessen, *Urban Sufisme*, h. 170



Orang yang paling berpengaruh dalam pendirian Jam'iyah ini adalah Kiai Musta'in Romly. Dia menggantikan ayahnya sebagai kiai Rejoso dan Syaikh Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah. Ia mewarisi jaringan yang luas di berbagai cabang-cabang lokal tarekat yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Ia membangun relasi yang sangat baik dengan pemerintah lokal yang membantunya menarik lebih banyak lagi pengikut. Pada tahun 1970-an jumlah muridnya diberbagai cabang di Jawa Timur konon mencapai 150.000 orang. Hal ini yang menjadikan dirinya diperhitungkan, bahkan oleh pemerintah pusat. Pada 1975 Kiai Musta'in menyelenggarakan muktamar pertama Jam'iyah dengan mengumpulkan guru-guru tarekat dari seluruh Jawa. Muktamar ini dibuka oleh Presiden Soeharto dan banyak pejabat tinggi yang hadir, sebuah indikasi arti penting yang kemudian melekat pada tarekat.

Dengan demikian Kiai Musta'in telah menjadikan Jam'iyah sebagai kendaraan yang digunakan pemerintah untuk mencapai masa pedesaan dan melibatkan mereka dalam pembangunan (slogan yang meringkas kebijakan Orde Baru), dan disisi lain. Melalui kendaraan itu pula guru-guru sufi dapat berpartisipasi dalam proyek modernisasi dan merekrut kalangan birokrat, teknisi dan kelompok profesional sebagai murid. Dan utnuk alasan personal maupaun pragmatis, jumlah pejabat semakin banyak mencari Kiai Musta'in dan Syaikh Sufi lainnya sebagai penasehat spiritual. Hubungan patronase yang saling menguntungkan pun berkebang.

KESIMPULAN

Peranan agama pada masa Orde Baru memang sudah tidak bisa kita nafikan. Kelompok keagamaan seperti tarekat, partai politik islam dan yang lainnya mengambil bagian penting dalam perkembangan modernisasi Indonesia. Mereka (kelompok keagamaan seperti tarekat, partai politik) berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan juga kalangan elit birokrasi.

Awalnya kelompok tarekat berorientasi pada bidang keagamaan dan spiritual, namun seiring dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia, ia pun menjadi bagian dari partai politik. Ini tidak bisa dipungkiri, karena guru-guru tarekat memiliki massa yang banyak untuk memainkan politik, misalnya pada Pemilu.

Dengan massa yang banyak itu, pemerintah pun melegitimasi kelompok tarekat tersebut, bahkan pemerintah mengiktui mu'tamar yang diadakan oleh kelompok tarekat. Tidak hanya itu para elit birokrasi juga memiliki kepentingan personal kepada guru-guru tarekat atau sufi sebagai pembimbing spiritual mereka. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan baik bagi guru sufi/tarekat maupun para elit birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van, *Urban Sufisme*, Rajawali Press: Jakarta, 2008.
- Bibit Surapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, PT. Dunia Pustaka Jaya: Jakarta, 1983.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan teoi sosial modern*, UI-Pres; Jakarta, 1986
- Hanafie, Haniah dan Suryani, *Politik Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2009.
- Sutiono, *Benturan Budaya Islam, Puritan dan Sinkretis*, PT. Komasa Mesia Nusantara: Jakarta, 2010.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi agama*, Remaja Rosdakarya; Bandung, 2006.
- Maarif, A. Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga, 1988
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Press, 1987
- Weber, Max, *sosiologi agama*, IRCiSoD; Yogyakarta, 2012.
- Sya'rani, Muh., and Muh. Zakaria. "Dinamika Dan Problematika Pendidikan Agama Masyarakat Minoritas Islam Wetu Telu Di Lombok Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Penelitian Tarbawi* 4, no. 2 (September 19, 2019): 24-43. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v4i2.234>.
- Zakaria, Muh. "17-27 Perkembangan Pemikiran Studi Keislaman Di Indonesia: Paradigma Interpretasi." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 18, no. 2 (December 10, 2020): 17-27. <https://doi.org/10.37216/tadib.v18i2.373>.